

SKRIPSI
EVALUASI PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN DI
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARRU

ANDI ANISSYA VARIZA RIVAI
E011191052



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Andi Anissya Variza Rivai (E011191052) dengan judul skripsi yaitu “Evaluasi Program Pemeliharaan jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru” xiv + 73 Halaman + 2 Gambar + 9 Tabel + 41 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing Oleh Dr. Nurdin Nara, M.si dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai evaluasi program pemeliharaan jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai masalah yang diteliti. Serta, fokus penelitian didasarkan pada 6 kriteria evaluasi menurut Willian Dunn (2003) yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan

Hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan program pemeliharaan jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Pemeliharaan Jalan



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Andi Anissya Variza Rivai (E011191052) with the thesis title “Evaluation of the Road Maintenance Program in the Highways Sector of the Public Works and Spatial Planning Office of Barru Regency” xiv + 73 Pages + 2 Images + 9 Tables + 41 Bibliography + Appendix + Supervised by Dr. Nurdin Nara, M.si and Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP.

In general, this study aims to analyze and describe the evaluation of the road maintenance program in the Bina Marga Sector of the Public Works and Spatial Planning Office of Barru Regency.

In this study using a qualitative descriptive research method. Data collection techniques using observation techniques, interviews, and documentation regarding the problem under study. Also, the research focus is based on 6 evaluation criteria according to Willian Dunn (2003) namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy.

The results of this study found that the implementation of the road maintenance program by the Highways Division of the Public Works and Spatial Planning Office of Barru Regency had been carried out quite well.

Keywords: Evaluation, Road Maintenance



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDI ANISSYA VARIZA RIVALI

NIM : E011191052

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 6 Februari 2023



ANDI ANISSYA VARIZA RIVALI

E011191052



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ANDI ANISSYA VARIZA RIVAI
NIM : E01119 1052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan di Bidang Bina
Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barru

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1 002

Pembimbing II,

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP
NIP 19720507 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si

NIP 19631015 1989031006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ANDI ANISSYA VARIZA RIVAI
NIM : E01119 1052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan di Bidang Bina
Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barru

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Nurdin Nara, M.Si

()

Sekretaris : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP

()

Anggota : 1. Dr. Nelman Edy, M.Si

()

2. Dr. Badu, M.Si

()

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru”.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman telah berusaha merampungkan skripsi ini semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih terdapat kesalahan serta kekurangan pada naskah skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran serta kritikan yang bersifat membangun untuk dapat membenahi peneitian berikutnya. Dengan segala kerendahan hati dan segenap cinta dan kasih sayang kepada kedua orangtua penulis yang senantiasa dengan ikhlas mendoakan dan menjadi penyemangat penulis, kepada ibunda tercinta **Ir. Hj. Husmariansi Summas** dan Ayahanda **Ir. Andi Rivai**, terimakasih banyak atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dengan setulus hati telah merawat serta mendidik, tak lupa pula nasihat-nasihat yang diberikan menjadi semangat penulis selama menempuh masa pendidikan, dukungan moral dan materil secara rohani dan jasmani kepada penulis. Dan juga, saudara penulis satu-satunya **Andi Bintang** yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis, serta semua keluarga yang senantiasa mendoakan penulis.

Penyusunan skripsi ini pula tidak luput dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh staf;
2. **Dr. Phil. Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan seluruh staf;
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP** selaku Ssekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
5. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** sekaligus Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing I yang telah memberi nasehat dan bimbingan untuk penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
6. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan yang sangat berarti sejak proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
7. **Drs. Nelman Edy, M.Si** dan **Dr. Badu, M.Si** selaku dosen penguji dalam ujian skripsi ini. Terimakasih atas segala kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. **Seluruh Dosen dan Staf Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.** Terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan khususnya ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua dan penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

9. **Drs. Baharuddin** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian di lokasi. Terimakasih atas kesediaan para staf dalam membantu penulis selama penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru.
10. Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat penulis **FIGHTER** gurlsss (A. Ainunsakinah Ak, Nur Wahida, dan Nurul Avizah Latif) yang tak pernah bosan untuk selalu mengingatkan serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih sudah saling mendoakan serta menguatkan pada segala kondisi dan *struggle* selama masa perkuliahan, terimakasih menjadi tempat aku pulang. *I don't know if I can geet through my campus life without ur support, I'm grateful to be ur bestfriend.* Doa yang terbaik untuk kalian dan semoga segala impian kita tercapai, Aaamiin.
11. Terimakasih kepada **bestie-bestie** penulis yaitu Yulia Yulandari, Zhafirah Azhary, Much Faisal, Naufal Asril, Saiful Islam, Vera Cantika, Tenri Ajeng, Rezky Nurfadhillah, Asriana, Nantasya, Nova Kirana, Sri Amriani, Anak Rumah, dan gengnya tika yang telah kebersamai selama perkuliahan dan banyak *moment-moment* yang telah dilalui bersama. Semoga canda tawa tersebut tetap terjalin, *Sukses ki' guys!*
12. **MIRACLE 19** terimakasih banyak atas segala dukungan yang telah diberikan dari awal perkuliahan hingga sekarang. Banyak pengalaman dan kenangan bersama yang telah dilalui dalam berproses. Terimakasih telah menjadi teman dan sahabat yang baik selama perkuliahan penulis. Miracle majulah bersama, meraih mimpi, dan menaklukkan dunia!

13. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar **HUMANIS FISIP UNHAS** atas segala pengalaman, kebersamaa, cerita, dan proses belajar yang telah penulis lalui.
14. Terimakasih kepada Anggota **Departemen Komunikasi dan Informasi Humanis Fisip Unhas Periode 2021-2022** (Koord Azwar, Dira, Ayu, Fitrah, Syalom, Fitri, Nanda, dan Rifki) atas segala dukungan dan doa. Serta terimakasih telah menjadi *partner* berproses dalam Kominfo.
15. Terimakasih kepada *bestie-bestie* **KKN Gelombang 107 Ujung Pandang** yang telah menjadi *partner* kerja sama dari awal hingga akhir pelaksanaan KKN, moment-moment selama menjalankan proker akan menjadi sebuah kisah menyenangkan selama masa perkuliahan penulis dengan penuh rasa kekeluargaan, dukungan, dan tawa dalam bekerjasama menyelesaikan program-program kerja.
16. Terimakasih kepada **Bangtan Sonyeondan (BTS)**. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang telah menjadi penyemangat penulis secara virtual disaat penulis lelah. Dengan karya-karyanya yang menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini, *Borahae!*
17. *Last but not least*, terimakasih kepada diri sendiri **Andi Anissya Variza Rivai** yang selalu berusaha untuk tidak lelah, selalu optimis, serta semangat untuk melawan rasa malas selama penyusunan skripsi. Semoga segala harapan serta impian dapat tercapai dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT Aamiin.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala kebaikan, bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan penulis mengucapkan terimakasih

banyak, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan kita semua Aaamiinn. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Makassar, 6 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	11
Tujuan Penelitian	11
Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
Konsep Kebijakan Publik	12
Pengertian Kebijakan Publik	12
Karakteristik Kebijakan Publik.....	15
Tahapan Kebijakan Publik.....	17
Konsep Evaluasi Kebijakan	17
Pengertian Evaluasi Kebijakan	17
Kriteria Evaluasi.....	25
Konsep Pemeliharaan	27
Penelitian Terdahulu.....	28
Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
Pendekatan Penelitian	31
Tipe Penelitian	31
Lokasi Penelitian	32
Fokus Penelitian.....	32
Informan Penelitian	33

Sumber Data.....	34
Teknik Pengumpulan Data	34
Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
Struktur Organisasi.....	40
Jumlah Pegawai.....	41
Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai	41
Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru	44
BAB V PENUTUP	66
Kesimpulan	66
Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	40

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Barru Tahun 2020	38
Tabel IV.2 Jumlah Pegawai	41
Tabel IV.3 Jumlah Tim Swakelola	53
Tabel IV.4 Kondisi Panjang Jaringan Ruas Jalan di Kabupaten Barru pada Tahun 2016 - 2020	56
Tabel IV.5 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020	57
Tabel IV.6 Data Kondisi Jalan Tahun 2021	58
Tabel IV.7 Data Kondisi Jalan Tahun 2022	59
Tabel IV.8 Data Lokasi Pemeliharaan Jalan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan pengembangan dalam mempercepat pembangunan nasional, pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi serta mendukung berbagai aspek penunjang guna meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur ialah salah satu aspek penting dalam mempercepat peningkatan pembangunan nasional. Infrastruktur yang memadai dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat serta dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat.

Dalam memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari serta kelancaran pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Dengan adanya keberadaan infrastruktur jalan ini dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah.

Jalan adalah salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur baik dalam cakupan nasional maupun daerah. Selain itu, jalan sebagai prasarana transportasi darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antar satu kota dengan kota lainnya ataupun antar daerah lainnya. Kondisi jalan yang memadai akan memudahkan mobilitas penduduk dalam melakukan aktivitas perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan, jika terjadi kerusakan jalan dapat memperlambat kegiatan perekonomian dan juga

dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang berimbas pada keselamatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan pada ketentuan umum Pasal 1 Ayat (4) dikatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Oleh karena itu disebutkan pula bahwa jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat dibutuhkan sebagai sarana transportasi pada Negara Republik Indonesia, yang dimana berperan sebagai alat bantu umum dalam mengarahkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal di atas selaras dengan apa yang telah diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (3) bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan di atas yang pada hal ini adalah penyediaan infrastruktur jalan sebagai salah satu bentuk fasilitas umum, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur mengenai peran jalan yang terdapat pada Pasal 5 Ayat 1 bahwa jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan

keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Adapun, Tanggapan masyarakat mengenai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelayanan publik dalam hal infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya ialah menunjukkan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Tetapi, antara harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur kerap tidak sesuai. Sehingga dapat dikatakan terjadinya kesenjangan harapan (*expectation*) atau ekspektasi yang lebih oleh masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru ialah salah satu organisasi formal di lingkungan pemerintah yang berperan pada pembangunan infrastruktur-infrastruktur Kabupaten Barru seperti jalan, jembatan, drainase dan pembangunan lainnya. Berhasilnya pengerjaan infrastruktur tentunya pasti ada manajemen yang baik pada organisasi serta kinerja terbaik dari para pegawai dalam setiap pengerjaan infrastruktur. Dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Barru tentunya pada hal infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru diiringi dengan visi misi yaitu “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berdaya Saing yang Bernafaskan Keagamaan”.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Barru, dengan struktur

organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan 3 bidang ialah Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, dan Bidang Cipta Karya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan pada bidang pekerjaan umum. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Bagian kesatu pasal 57 ayat 1, menjelaskan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan, pasal 18 menyebutkan pelaksanaan pemeliharaan jalan yaitu :

- 1) Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan.

2) Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c. pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija;
- e. pengisian celah/retak permukaan (sealing);
- f. laburan aspal;
- g. penambalan lubang;
- h. pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i. pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j. Grading operation / Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. pelapisan ulang (overlay);
- b. perbaikan bahu jalan;
- c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain fog seal,

chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI),;

- d. pengasaran permukaan (regrooving);
- e. pengisian celah/retak permukaan (sealing);
- f. perbaikan bangunan pelengkap;
- g. penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h. pemarkaan (marking) ulang;
- i. penambalan lubang;
- j. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (ripping and reworking existing layers) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

3) Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:

- a. pelapisan ulang;
- b. perbaikan bahu jalan;
- c. perbaikan bangunan pelengkap;
- d. perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;
- e. penambalan lubang;
- f. penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement);
- g. penanganan tanggap darurat.
- h. pekerjaan galian;

- i. pekerjaan timbunan;
 - j. penyiapan tanah dasar;
 - k. pekerjaan struktur perkerasan;
 - l. perbaikan/pembuatan drainase;
 - m. pemarkaan;
 - n. pengkerikilan kembali (regraveling) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan; dan
 - o. pemeliharaan/pembersihan rumaja.
- 4) Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:
- a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud;
 - b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;
 - c. perbaikan perlengkapan jalan;
 - d. perbaikan bangunan pelengkap; dan
 - e. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Adanya infrastruktur jalan memudahkan segala aktivitas masyarakat sehari-hari serta mempermudah akses. Sehingga sangat perlu diperhatikan kondisi jalan yang sesuai dengan harapan masyarakat agar tidak terjadi keterhambatan aktivitas masyarakat. Dengan infrastruktur jalan yang memadai akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas dan bertransportasi.

Pada penelitian terdahulu oleh Agung Fadilah Yudistira (2021) dengan judul penelitian "Evaluasi pembangunan Pasar Tradisional di

Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”. Adapaun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pasar tradisional pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik tapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaannya yaitu mengenai kejelasan program dimana ketidaktahuan pedagang tentang kegiatan pembangunan tersebut, bagaiman perencanaan pembangunannya dan penataannya pedagang tidak mengetahui. Serta lokasi tersebut kurang strategis serta tidaknya SDM untuk melakukan sosialisasi. Serta perbedaan Penelitian terdahulu ini fokus pada Evaluasi Pembangunan Pasar Tradisional sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu Evaluasi program Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kemudian pada penelitian terdahulu ini menggunakan teori George R. Terry sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:608).

Berdasarkan berita yang dimuat pada *Website* : <https://makassar.tribunnews.com/2022/04/09/hanya-ditambal-dan-ditempel-saja-warga-keluhkan-jalan-rusak-sepanjang-7-km-di-pattappa-barru> Tentang rusaknya jalan sepanjang 7 Km di Pattappa Barru. Rusaknya jalan tersebut membuat aktivitas masyarakat sekitar menjadi terhambat.

Adapun, berita yang termuat pada *Website* : <https://kedai-berita.com/2022/01/07/jalan-rusak-di-barru-dikeluhkan-pengguna-jalan/> mengenai kerusakan jalan yang berlokasi Tanete Riaja Ele Desa Lompo dan Desa Tellumpanua yang merupakan akses digunakan masyarakat.

Sehingga akan terjadinya hal ini menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, menyebutkan jalan terdiri dari jaringan dan ruas. Jaringan jalan dibedakan menjadi 3 yaitu Aksesibilitas, Mobilitas, dan Keselamatan. Aksesibilitas ialah tersedianya jalan yang menghubungkan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Mobilitas ialah tersedianya jalan yang dapat memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Keselamatan ialah tersedianya jalan yang dapat menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Adapun, ruas jalan yang terdiri dari kondisi jalan dan kecepatan. Kondisi jalan ialah tersedianya jalan yang mampu menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Dan kecepatan adalah tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai suatu instansi yang berperan dalam melakukan serta mengawal pembangunan pada infrastruktur di daerah. Infrastruktur yang baik serta lengkap akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari serta memperlancar perekonomian daerah. Adapun, jika suatu infrastruktur tidak memadai akan menghambat aktivitas masyarakat serta menghambat perekonomian sehingga mengakibatkan pembangunan daerah juga terhambat dan tidak berkembang.

Berdasarkan hasil dari pra-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada 12 September 2022 di lapangan, sehingga terdapat beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Barru pada program pemeliharaan infrastruktur jalan pada hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru perlu memerhatikan pemeliharannya sehingga masih terdapat pada beberapa titik jalan di Kabupaten Barru yang masih mengalami kerusakan.
2. Keluhan masyarakat sekitar terkait akses jalan yang terhambat sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat juga mengalami keterhambatan disebabkan oleh banyaknya jalanan yang rusak.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan pemeliharaan jalan yang tidak memeriksa secara berkala terkait pemeliharaan jalan. Jalan yang telah dilakukan perbaikan akan mengalami kerusakan kembali jika tidak ada perawatan yang lebih lanjut setelah diperbaiki.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang permasalahan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai Evaluasi pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru terkait pemeliharaan jalan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimana Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi atas dua bagian, yakni :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai Evaluasi Program. Serta dapat pula dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan membahas bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran ataupun masukan bagi Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengetahui pentingnya mengevaluasi dalam pemeliharaan jalan sehingga diketahui penyebab tidak berjalannya suatu program pemerintah dengan baik. Dan dapat pula menjadi bahan referensi bagi organisasi dalam mengevaluasi dan meningkatkan program kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Helo dalam Parsons (2001:14) kebijakan (*policy*) merupakan istilah yang telah banyak di sepakati bersama. Dalam menggunakan kata umum, istilah kebijakan ini telah dianggap berlaku pada sesuatu yang lebih besar dibanding keputusan tertentu, tetapi kecil dibanding gerakan sosial.

Antara kata kebijaksanaan dan kebijakan, ada perbedaan yang membedakan “policy” sebagai suatu keputusan pemerintahan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “discretion” yang artinya keputusan yang bersifat kasuistis pada satu hal.

Kebijakan publik menurut Nugroho dalam Eko Handoyo (2012:6) ialah salah satu komponen negara yang tidak dapat diabaikan. Negara tanpa adanya komponen kebijakan publik akan dianggap gagal, sebab kehidupan bersama hanya dapat diatur oleh seseorang ataupun sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, bertujuan memenuhi kepentingan diri atau kelompok.

Menurut Dye dalam Eko Handoyo (2012:9) mengartikan bahwa kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Sementara itu, Thomas Dye dalam Sahya Anggara (2014:35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu hal yang

dikerjakan ataupun tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan memiliki manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut dapat mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, pada saat inilah pemerintah harus bijaksana ketika menetapkan suatu kebijakan.

Aminullah dalam Muhammadi dalam Sahya Anggara (2014:37) mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu upaya ataupun tindakan dalam mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya serta tindakan tersebut dapat bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Adapun, menurut Said Zainal Abidin dalam Sahya Anggara (2014:37), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, namun luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai pedoman umum dalam kebijakan dan keputusan istimewa di bawahnya.

Menurut Rose dalam Wicaksono (2006:64) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan susunan ketergantungan yang kompleks berdasarkan pilihan-pilihan kolektif yang saling ketergantungan, termasuk juga ketentuan-ketentuan untuk tidak bertindak, yang telah dibuat oleh badan atau instansi pemerintah.

Kebijakan publik pada perspektif konseptual dapat dilihat dari kamus administrasi publik Chandle dan Plano dalam Pasolong (2010:28), mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis pada sumber-sumber daya dalam menyelesaikan masalah publik atau pemerintahan.

Dunn (2003:22) mengemukakan bahwa pada proses pembuatan kebijakan merupakan urutan aktivitas intelektual yang dilaksanakan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Kegiatan politis tersebut dipaparkan atas proses pembuatan kebijakan serta diilustrasikan sebagai urutan tahap yang saling memiliki ketergantungan yang kemudian diatur pada urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Menurut Ndraha (2011:498) bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk mengelola nilai pemerintahan yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintahan dan terikat melalui cara formal, etik, dan moral, diarahkan agar pertanggung jawaban pelaku pemerintahan ditepati pada lingkup lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Young & Quinn dalam Suharto (2005:44) bahwa kebijakan publik merupakan usaha yang disusun dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik pada umumnya bukanlah suatu keputusan bersifat tunggal, adapun terdiri dari beberapa pilihan strategi yang disusun dalam mencapai tujuan tertentu demi keutamaan masyarakat.

Anderson dalam Winarto (2014:21) mengatakan bahwa kebijakan adalah kegiatan yang tujuannya ditentukan oleh seorang aktor atau pelaku untuk mengatasi suatu masalah atau isu.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2005:4) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat strategi pemerintah dengan tujuan didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Adapun berdasarkan definisi tersebut, kebijakan publik mencakup beberapa hal, sebagai berikut :

1. Bidang kegiatan berperan dalam ekspresi dari tujuan umum pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
2. Proposal pilihan yang menunjukkan ketentuan-ketentuan pemerintah yang diputuskan.
3. Kewenangan formal yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah.
4. Program ialah seperangkat tindakan yang meliputi rencana penggunaan sumber daya lembaga dan tindakan dalam tercapai tujuan.
5. Keluaran *atau output* ialah apa yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu.

Berdasarkan definisi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kegiatan kebijakan bersifat politis yang merupakan proses pembuatan kebijakan yang tahapannya mengikuti yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan, agenda, formulasi kebijakan, mengadopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilai kebijakan.

Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2006:42) mengemukakan beberapa karakteristik penting dari kebijakan publik yaitu :

1. Pada dasarnya kebijakan publik difokuskan terhadap tujuan tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan khusus dibanding sikap yang mengalami perubahan atau acak.
2. Kebijakan publik pada umumnya bermakna bagian atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dibanding ketentuan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan suatu peraturan tertentu, tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
4. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Adapun Nugroho (2003:54-57) membagi kebijakan publik ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Makna kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.

2. Bentuknya, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yaitu yang disebut konvensi-konvensi.

Tahapan Kebijakan Publik

Dalam penyusunan agenda kebijakan publik, menurut Subarsono (2012:11) terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu :

1. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bawah sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain bukan dianggap masalah.
2. Membuat batasan masalah
3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

Sedangkan tahapan kebijakan publik dalam Abidin (2012:73), yaitu :

1. Identifikasi dan perumusan masalah
2. Proses perumusan kebijakan publik
3. Pelaksanaan kebijakan publik
4. Evaluasi kinerja kebijakan publik

Konsep Evaluasi Kebijakan

Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2006:140-141) mengemukakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian

kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Dunn (2003:679) mengemukakan bahwa evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya sejauh mana tujuan dicapai.

Kosasih dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:23-33) mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Menurut Jones dalam Soekarno (2003:173) bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan serta perkembangannya. Evaluasi juga merupakan kegiatan yang dipersiapkan ditujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah yang terutama sekali terdiri dari kegiatan-kegiatan, pemilah-pemilah objek, cara pengukuran dan metode analisa.

Menurut Nurcholis (2005:169) Evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Selanjutnya menurut Syafiie (2013:3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya, ialah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum;
3. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberi bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;
5. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan ke jabatan lainnya;
6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum;
7. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Adapun evaluasi kebijakan menurut Anderson dalam Soekarno (2003:149) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan lebih dari sekedar proses teknik atau analitis, melainkan juga merupakan proses politisi dan selanjutnya evaluasi kebijakan itu menunjukkan bahwa meskipun evaluasi itu dimaksudkan dengan tujuan yang tidak memihak dan objektif akan menjadi politis atau kegiatan politik dengan terjadinya pengaruh terhadap alokasi sumber-sumber daya dalam masyarakat.

Menurut Ndraha (2011: 201) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Kemudian Ndraha (2011:202) menjelaskan tiga model evaluasi, yakni :

- a. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya dalam kondisi before.
- b. Model das Solen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das Solen.
- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Adapun evaluasi menurut Abidin (2012:165), evaluasi mencakup 3 hal :

1. Evaluasi awal, proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan
2. Evaluasi dalam proses implementasi/monitoring
3. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah proses implementasi kebijakan
Dunn dalam Abidin (2012:160) memaparkan bahwa ada 4 aspek dalam evaluasi kebijakan, yakni sebagai berikut :
 1. *Value*, artinya evaluasi lebih memusatkan diri pada nilai atau keputusan dalam pencapaian hasil dari suatu kebijakan
 2. Evaluasi memberi tekanan yang sama antara fakta dan nilai.
 3. Orientasi evaluasi tidak hanya pada nilai, tapi juga ada pada nilai masa lampau
 4. Evaluasi mempunyai dua posisi, yaitu sebagai tujuan dan sekaligus sebagai alat.

Secara umum, evaluasi memberikan nilai pada kualitas sesuatu. Selain itu, evaluasi juga dipahami sebagai suatu proses di mana informasi direncanakan,

diperoleh dan disediakan, yang diperlukan untuk alternatif keputusan. Oleh karena itu, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis di mana ditentukan atau diputuskan sejauh mana tujuan instruksional telah dicapai.

Ada, Lima model evaluasi yang biasanya sering digunakan yaitu:

1. Model Evaluasi CIPP
2. Model Evaluasi UCLA
3. Model Evaluasi brinkerhoff
4. Model Evaluasi Stake atau model countenance
5. Model Evaluasi Metfessel dan Michael

Berikut uraian dari kelima model evaluasi di bawah ini :

1. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985), merupakan model evaluasi berorientasi keputusan yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan. Stufflebeam menyarankan bahwa hasil penilaian memberikan alternatif pilihan pemecahan masalah kepada para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 huruf yang diuraikan sebagai berikut :

a. Context evaluation to serve planning decision.

Evaluator harus memiliki pemahaman yang menyeluruh dan akurat tentang konteks evaluasi yang berkaitan dengan perencanaan pengambilan keputusan, identifikasi kebutuhan, dan perumusan tujuan program.

b. Input Evaluation structuring decision.

Semua hal yang berkaitan dengan proses evaluasi harus dipersiapkan dengan baik. Masukan penilaian ini membantu dalam pengambilan keputusan, menentukan sumber daya yang diperlukan, mencari berbagai alternatif yang layak, menentukan rencana yang matang, menyiapkan strategi yang layak dan mempertimbangkan metode kerja agar dapat tercapai.

c. Process evaluation to serve implementing decision.

Evaluasi proses ini berkaitan dengan pelaksanaan program. Beberapa pertanyaan harus dijawab dalam proses evaluasi. Misalnya, apakah rencana dibuat sesuai dengan implementasi industri? Apakah ada yang bisa diperbaiki dalam proses pelaksanaan program? Dengan demikian, proses pelaksanaan program dapat dipantau, dikendalikan atau bahkan ditingkatkan.

d. Product evaluation to serve recycling decision.

Berdasarkan hasil evaluasi, diambil keputusan tentang keputusan mana yang harus diambil selanjutnya. Keunggulan model ini adalah dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan tanggung jawab program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam model ini adalah delimitasi, akuisisi atau penawaran dan penawaran oleh pengambil keputusan.

2. Model Evaluasi UCLA

Alkin (1969) mengemukakan bahwa Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk membuat ringkasan informasi yang berguna bagi pengambil

keputusan ketika memilih di antara beberapa alternatif. Ia mengemukakan 5 macam evaluasi yakni :

- a. Sistem *assessment*, yaitu memberikan informasi terkait kondisi atau posisi sistem.
 - b. Program *planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
 - c. Program *implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan
 - d. Program *improvement*, yang memberikan informasi tentang cara kerja program, cara kerja atau cara kerja program. Ketika sampai pada pencapaian tujuan, masalah atau masalah baru muncul secara tak terduga ?
 - e. Program *certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.
3. Model Evaluasi Brinkerhoff Brinkerhoff & Cs. (1983),
Memperkenalkan tiga kelas ulasan berdasarkan penggabungan elemen yang sama dengan pengulas lain tetapi dalam komposisi dan versinya sendiri sebagai berikut :
- a. *Fixed vs Emergent Evaluation Design*. Akhirnya, dapatkan masalah penilaian dan kriteria direkonsiliasi, jika demikian, apakah ini perlu? Penjelasanannya tidak sempurna.
 - b. *Formative vs Summative Evaluation*. Apakah penilaian akan digunakan untuk perbaikan atau untuk melaporkan manfaat atau keunggulan program, atau keduanya. .

c. *Experimental and Quasi Experimental Design vs Natural/ Unobtrusive Inquiry*. Apakah evaluasi melibatkan intervensi dalam kegiatan program/manipulasi kondisi tetap, orang yang dirawat, variabel yang terpengaruh, dll., atau hanya observasi, atau keduanya?

4. Model Evaluasi *Stake* atau model *Countenance*

Menurut model "Pertimbangan", evaluasi harus mencakup langkah-langkah berikut: Jelaskan program (berbagi informasi dengan pihak yang berkepentingan), dapatkan ulasan dan analisis (berbagi hasil analisis dengan klien). Selain itu, model responsif mempertahankan perhatian konstan dari reviewer dan semua pihak yang terlibat dalam review. Model penilaian minat (1967), analisis proses penilaian yang paling berpengaruh di bidang ini, memberikan dasar konseptual yang sederhana namun kuat untuk pengembangan lebih lanjut dalam penilaian. Stake menekankan pada dua jenis kegiatan yaitu deskripsi dan evaluasi, serta membedakan tiga fase dalam evaluasi program yaitu: Persiapan atau pengenalan, proses atau peristiwa, keluaran atau hasil.

5. Model Evaluasi Metfessel dan Michael Metfessel dan Michael (1967), dapat digunakan oleh guru dan evaluator program.

Dalam strategi model Metfessel dan Michael terdapat delapan langkah yaitu Keterlibatan masyarakat (*envalvement of the community*) yakni :

- a. orang tua, ahli-ahli pendidikan dan peserta didik
- b. Pengembangan tujuan dan memilih tujuan menurut skala prioritas.
- c. Menterjemahkan tujuan menjadi bentuk tingkah laku dan mengembangkan pengajaran.

- d. Mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan.
- e. Menyusun dan mengadministrasi ukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan.
- f. Menganalisis hasil pengukuran
- g. Menginterpretasi dan mengevaluasi data
- h. Menyusun rekomendasi untuk mengembangkan pengajaran.

Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn (2003:608) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung kriteria sebagai berikut :

1. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

Nurcholis (2007:274) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh *input*, proses, *output*, dan *outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Adapun evaluasi membutuhkan skema penilaian, sebagai berikut :

1. *Input*, merupakan masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Proses, merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. *Outputs* (hasil), merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
4. *Outcomes* (dampak), adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata pada kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Weiss dalam Widodo (2007:114-115) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan mengandung beberapa unsur penting, yaitu :

1. Untuk mengukur dampak (*to measure the effect*) dengan bertumpu pada metode riset yang digunakan.
2. Dampak (*effect*) menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral, yang melekat pada aturan-aturan atau standar
3. Perbandingan antara dampak (*effect*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.

4. Memberi kontribusi pada pembuatan keputusan kemudian perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial dari evaluasi.

Konsep Pemeliharaan

Menurut Sehrawa dan Narang (2001:220) dalam Pemeliharaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas).

Menurut Kodoatie (2003: 87), pemeliharaan pada jalan pada dasarnya pemeliharaan rutin (*routine*) dan berkala (*periodic*) dilakukan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan (*betterment*) dilakukan hanya pada kondisi kerusakan struktural jalan. Pada kegiatan pemeliharaan jalan dapat dibagi tiga yaitu:

1. Pemeliharaan Rutin (*Routine*): pemeliharaan berkala yang dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan di luar tugasnya sebagai pekerja.
2. Pemeliharaan Berkala (*Periodic*): pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin berfungsinya jalan dengan baik dan untuk memperpanjang umur jalan tersebut.
3. Serta pemeliharaan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan (*betterment*).

Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini merupakan bahan pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian dengan memperbanyak referensi teori yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih oleh peneliti sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian.

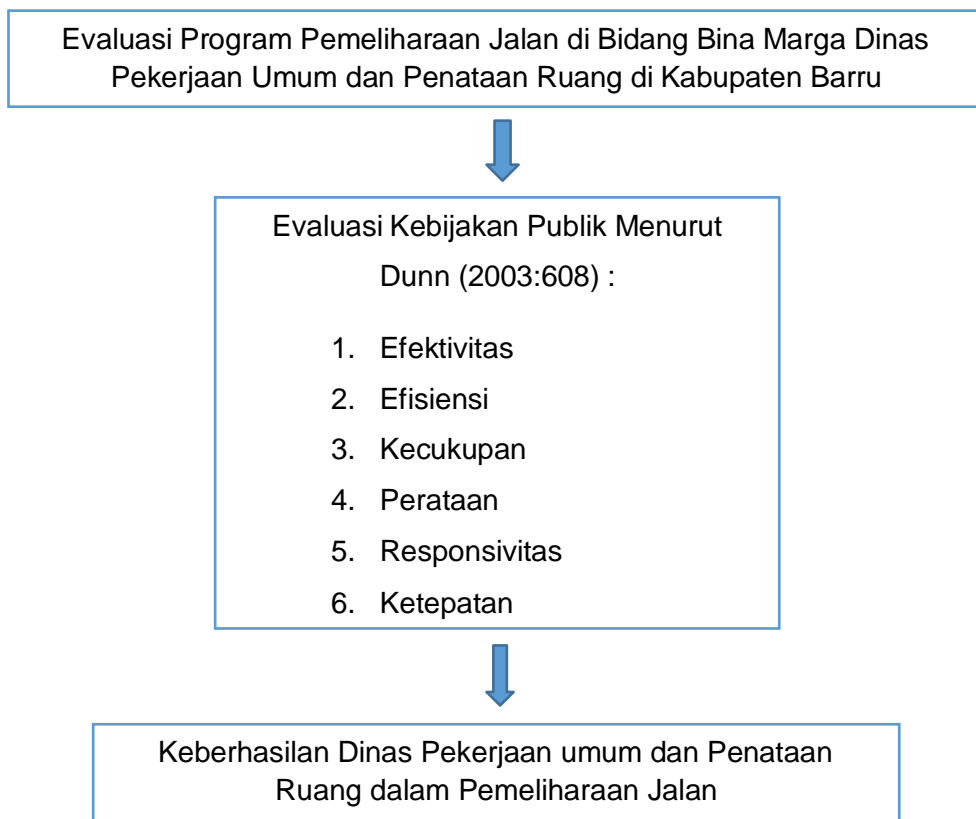
Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Relevansi	Perbedaan
Agung Fadilah Yudistira /2021	Evaluasi pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sudah berjalan cukup baik tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaannya yaitu mengenai kejelasan program dimana ketidaktahuan pedagang tentang kegiatan pembangunan tersebut, bagaimana perencanaan pembangunannya dan penataannya pedagang tidak	Hasil penelitian terdahulu dan rencana penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan pada tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis mengenai Evaluasi	Penelitian terdahulu ini fokus pada Evaluasi Pembangunan Pasar Tradisional sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu Evaluasi program Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kemudian pada penelitian terdahulu ini menggunakan teori George R. Terry sedangkan penelitian yang akan

		mengetahui. Serta lokasi tersebut kurang strategis serta tidaknya SDM untuk melakukan sosialisasi.		dilakukan menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:608)
Agus S. /2019	Evaluasi Implementasi Kebijakan Semarang Smart City di Kotadaft Semarang	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Semarang Smart City belum sesuai dengan masterplan Semarang Smart City. Dalam melaksanakan kebijakan tidak sepenuhnya patuh pada masterplan.	Hasil penelitian terdahulu dan rencana penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan pada tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis mengenai Evaluasi	Penelitian terdahulu ini fokus pada Evaluasi Implementasi Kebijakan Semarang Smart City sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu Evaluasi program Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kemudian pada penelitian terdahulu ini menggunakan teori Edward III sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:608)

Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dan tujuan yang telah dipaparkan, maka peneliti akan menggunakan teori-teori kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:608) dengan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Pikir